

PENDIDIKAN DI INDONESIA MASA PENDUDUKAN JEPANG

Hudaidah¹⁾, M.Arman Putra Karwana²⁾

^{1) 2)}Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya
¹⁾hudaidah@fkip.unsri.ac.id ²⁾armanputra189@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang Pendidikan di Indonesia Masa Pendudukan Jepang. Adapun tujuan tulisan ini ingin mendeskripsikan pengaruh pendudukan Jepang terhadap Pendidikan di Indonesia. Tulisan ini merupakan hasil kajian historis dengan langkah heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, melakukan beberapa kebijakan pendidikan yaitu penanaman budaya Jepang, reformasi system pendidikan, kebijakan pada kurikulum dan kebijakan pada pendidikan Islam. Sehingga selama menjajah, Jepang telah melakukan kebijakan bidang pendidikan yang berimplikasi pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan Indonesia.

Kata kunci: pendidikan, Indonesia, pendudukan Jepang

Abstract

This article discusses Education in Indonesia during the Japanese Occupation. The purpose of this paper is to describe the influence of the Japanese occupation on education in Indonesia. This paper is the result of a historical study using heuristics, criticism, interpretation and historiography steps. During the Indonesian occupation, Japan carried out several educational policies, namely cultivating Japanese culture, reforming the education system, policies on curriculum and policies to Islamic education. So that during the colonial period, Japan had implemented policies in the field of education which had implications for various types and levels of education in Indonesia.

Keywords: education, Indonesia, Japanese occupation

Pendahuluan

Perang dunia II, yang meluas ke wilayah Asia Pasifik, membawa perubahan politik di Asia Tenggara, Indonesia menjadi target Jepang untuk dikuasai. Serangan pasukan Jepang di Indonesia dimulai dengan menguasai Tarakan pada 10 Januari 1942, kemudian meluas ke Minahasa, Balikpapan, dan Ambon (Adams, C. 2007 : 201–207). Selanjutnya pada bulan Februari 1942 pasukan Jepang menduduki Pontianak, Makassar, Banjarmasin, dan Palembang, serta Bali. Ketika tiba di Tanah Air, Jepang lebih mengutamakan Palembang sebagai tempat pendudukan. (Hardi, tt : 171). Palembang menjadi penting bagi Jepang, karena berada pada

posisi sangat strategis, di tengah kekuasaan Batavia di Jakarta dan Singapura pusat kedudukan Inggris di Asia Tenggara.

Setelah Palembang Jepang menuju pulau Jawa, serangan dilakukan ke Banten, Indramayu, Kragan (antara Rembang dan Tuban). Selanjutnya menyerang pusat kekuasaan Belanda di Batavia (5 Maret 1942), Bandung (8 Maret 1942) (M.C. Ricklef, 2008 : 422). Pasukan Belanda yang berada di Jawa menyerah tanpa syarat kepada Panglima Besar Tentara Jepang Imamura di Kalijati (Subang, 8 Maret 1942). Dengan demikian, Indonesia telah menjadi bagian dari kekuasaan penjajahan Jepang. (Saifudin &

Saepuddin D, 2020). Sejak saat itu seluruh wilayah Indonesia sudah jatuh ke tangan pendudukan Jepang.

Kondisi ini berimplikasi terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Jepang dikenal lebih fasih dibandingkan Belanda. Pendudukan Jepang ke berbagai negara sebagai upaya ekspansi politik dan perang, pendudukan dilakukan dengan cara militeristis. Karena itu sejak Jepang menguasai wilayah Indonesia, kehidupan dan nasib bangsa Indonesia berada di bawah bayang-bayang kekuasaan pendudukan Jepang.

Jepang selain menguasai kehidupan politik, ekonomi dan militer juga berusaha menguasai pendidikan bangsa Indonesia. Berbagai upaya dilakukan Jepang untuk mempengaruhi system pendidikan di Indonesia, dibalik semua itu sebenarnya Jepang tetap pada tujuan utama yaitu menguasai dan menjajah Indonesia. Jepang melakukan berbagai kebijakan agar pendidikan di Indonesia dapat mendukung perang yang sedang dijalankan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan maka pokok masalah yang dikaji adalah bagaimana pengaruh pendudukan Jepang pada system pendidikan di Indonesia. Keunggulan tulisan ini adalah mencoba mendeskripsikan pengaruh pendudukan Jepang pada system pendidikan di Indonesia dan keterhubungannya dengan pendidikan saat ini.

Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode historis yaitu suatu proses menguji dan

menganalisa secara kritis redaksional buku referensi dan mengaitkan dengan kondisi pendidikan di Indonesia masa pendudukan Jepang di Indonesia. Penggunaan metode sejarah dalam penulisan artikel ini dilakukan melalui Penggunaan metode sejarah dalam penulisan artikel ini dilakukan melalui 4 tahap penelitian, yaitu: (1) Heuristik, menghimpun bahan-bahan atau sumber melalui studi kepustakaan, (2) Kritik sumber, menyeleksi data-data yang telah terkumpul melalui kritik intern dan kritik ekstern, (3) Interpretasi (4) Historiografi. (Syamsudin, Helius: 2007: 17)

Hasil dan Pembahasan

Setelah tahun 1942, Jepang mulai menyusun kebijakan yang akan dilakukan terhadap rakyat Indonesia. Belajar dari pengalaman di negara nya, keberhasilan mereka menjadi negara besar adalah dengan melakukan perubahan pendidikan. Kondisi ini menjadi pertimbangan Jepang untuk dapat menguasai Indonesia dengan sempurna maka harus membuat kebijakan di bidang pendidikan. Adapun kebijakan politik Jepang dalam bidang pendidikan diuraikan di bawah ini :

Kebijakan Penanam Budaya Jepang Melalui Pendidikan

Kebijakan pendidikan awal yang dilakukan oleh Jepang yaitu berusaha menanamkan budaya Jepang kepada masyarakat Indonesia. Pembentukan sebuah lembaga budaya bernama *Keimin Bunkha Shidôsho* atau Pusat Kebudayaan, dengan tugas untuk memperkenalkan dan menyebarkan kebudayaan Jepang, mendidik dan melatih seniman Indonesia. Sebagai upaya Jepang dalam penyebaran budaya di

Indonesia. (Yulianti, Dewi dalam <http://eprints.undip.ac.id>; Dewi, Setyanto dan Ambarastuti, 2015:48). Tindakan real yaitu dengan cara mewajibkan untuk menyanyikan lagu *Kimigayo* yang merupakan lagu kebangsaan Jepang dan pengibaran bendera Jepang. Hal ini dilakukan Jepang tentunya memiliki alasan yang dapat dibaca, sebenarnya tujuan utama Jepang adalah menjajah sehingga kewajiban menyanyikan lagu kebangsaan Jepang sebagai bukti pendudukannya di Indonesia.

Kebijakan lain yaitu melakukan *Seikeirei*, suatu cara memberi hormat dengan membungkukkan badan 90 derajat kepada Kaesar Jepang, Tenno Neika yang dipercayai oleh masyarakat Jepang sebagai keturunan Dewa Matahari pada setiap awal pembelajaran pada semua jenjang. (Putri, Arum S. 2020.)

Pembudayaan *Seikeirei* Jepang melalui pendidikan ini jelas bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia yang sebagian besar beragama Islam. Sehingga mendapat tentangan dari berbagai golongan Islam. Sayangnya walau telah mendapat penolakan berbagai golongan di Indonesia Jepang tetap menjalankan kebijakan tersebut. Akhirnya muncul berbagai gerakan melawan kebijakan Jepang.

Salah satu tokoh pendidikan, Hasyim Asy'ari menentang kebijakan Jepang tersebut. Akibatnya Hasyim Asy'ari mendapat kencaman dari pemerintah Jepang, beliau ditahan selama enam bulan di Jombang, Mojokerto dan Bubutan. Beberapa kiai dan santri meminta dipenjarakan bersama dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai tanda setia, dan khidmah kepada guru yang sangat mereka hormati (Yusrianto, 2014:273)

Kebijakan Jepang Terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia

Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang, dapat dikemukakan sebagai berikut ini :

1. Pendidikan Dasar (*Kokumin Gakko* / Sekolah Rakyat). dengan studi selama 6 tahun. Termasuk SR adalah Sekolah Pertama yang merupakan konversi nama dari Sekolah dasar 3 atau 5 tahun bagi pribumi di masa Hindia Belanda.
2. Pendidikan Lanjutan. Terdapat dua pendidikan lanjut yaitu, *Shoto Chu Gakko* (Sekolah Menengah Pertama) dengan lama studi 3 tahun dan *Koto Chu Gakko* (Sekolah Menengah Tinggi) juga dengan lama studi 3 tahun.
3. Pendidikan Kejuruan. Terdiri dari sekolah lanjutan bersifat vokasional antara lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian.
4. Pendidikan Tinggi. (Suwendi, 2004)

Sistem pendidikan di atas, merupakan tanda-tanda kemajuan dari pendidikan di Indonesia, terutama dari segi pendirian lembaga pendidikan seperti madrasah dan pondok pesantren di daerah terpencil. Di sisi lain, pemerintah Jepang juga telah menyediakan kursus sekolah dan latihan bagi calon guru. Adapun sekolah yang dimaksud bagi calon tenaga pengajar yaitu:

1. Sekolah Guru dengan studi selama 2 tahun yang dinamakan *Sjootoo Sihan Gakkoo*.
2. Sekolah Guru Menengah dengan studi selama 4 tahun yang dinamakan *Cutoo Sihan Gakkoo*.

3. Sekolah Guru Tinggi dengan studi selama 6 tahun yang dinamakan *kootoo Sihan Gakkoo*. (Posponegoro dan Notosusanto, 1993: 83)

Pendirian beberapa sekolah oleh pemerintah Jepang, sebenarnya ada hubungan dengan usaha penanaman ideologi Jepang yaitu *Hakko Ichiu* (kemakmuran bersama). Sekolah baru tersebut menjadi basis bagi Jepang untuk menanamkan hal tersebut. Guru-guru dibebani tugas sebagai penyebar ideologi *Hakko Ichiu*. Para guru dilatih pada pusat pelatihan yang ada di Jakarta. Setiap daerah mengirimkan calon guru untuk mengikuti pelatihan dengan syarat mendapat persetujuan dari pimpinan Jepang. Ketika kembali ke daerah masing-masing, guru tersebut wajib untuk menanamkan ideologi *Hakko Ichiu* siswanya bahkan kepada masyarakat di daerahnya. (Imran, 2018:76)

Selain itu, kebijakan pendidikan militer bagi rakyat Indonesia, seperti *Heiho* /organisasi militer dan PETA yang dibentuk Jepang untuk para pemuda (Posponegoro dan Notosusanto : 1993). *Heiho* dan PETA menjadi ajang pembelajaran keprajuritan yang diterima dari tentara Jepang, kemudian dimanfaatkan untuk mendapatkan pendidikan militer yang nantinya menjadi cikal bakal tentaran Republik Indonesia. Melalui *Heiho* ini pembejangan baris barbaris, pembelajaran menggunakan senjata, melakukan strategi perang menjadi pembelajaran gratis bagi para pemuda Indonesia dalam memperoleh pembelajaran militer.

Kebijakan Pemerintah Jepang terhadap Kurikulum Pendidikan di Indonesia:

Selama Jepang berkuasa, ada beberapa kebijakan dalam bidang kurikulum yang dilakukan oleh Jepang yaitu :

1. Kurikulum Pengajaran Bahasa Indonesia. Jepang melakukan perubahan kurikulum khususnya Bahasa pengantar yaitu pembelajaran dilakukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar materi. Penggunaan bahasa Indonesia menjadi signifikan. karena itu, maka pelajaran Bahasa Indonesia tetap menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah, dan menjadi bahasa resmi dan bahasa pengantar di sekolah. Hanya saja kemudian, ada kompensasinya yaitu bahasa Jepang ditetapkan sebagai pelajaran dan adat istiadat Jepang yang harus dipelajari. (Suwendi, 2004.)
2. Penghapusan Kurikulum Dualisme Pengajaran. Semua lembaga pendidikan masa Pemerintah kolonial Belanda dihapuskan oleh Jepang. Sistem dualisme yaitu pengajaran Barat dan pengajaran bumi putra tidak diberlakukan. Hanya ada satu jenjang sekolah untuk seluruh lapisan masyarakat yaitu Sekolah Rakyat atau *kokumun gakkoo* begitu juga Sekolah Desa masih tetap digunakan namun dengan nama Sekolah Pertama. (Sudibyo, Sigit. 2020:77)
3. Jenjang pendidikan bagi pendidik pengajar di masa Jepang berdasarkan tingkatannya adalah, Sekolah Rakyat enam tahun (termasuk

Sekolah Pertama), Sekolah Menengah tiga tahun (SMP pada zaman sekarang, dan Sekolah Menengah Tinggi tiga tahun (SMA pada zaman sekarang). (Hasbullah, 2001)

4. Bantuan Dana untuk Pembenahan Kurikulum Pendidikan
5. Mata. pelajaran dalam kurikulum yang dapat diajarkan yaitu mata pelajaran umum, seperti bahasa Indonesia, matematika, dan geografi. Kemudian pada tahun 1942 mulai pula diajarkan bahasa Jepang. (K. Enung, dkk, 2006).

Pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan yang menawarkan bantuan uang bagi sekolah, pesantren dan madrasah, sehingga bebas menyelenggarakan pendidikan sesuai target kurikulum seperti menyediakan buku-buku pelajaran, dana yang diberikan dan diperuntukkan untuk pengadaan buku-buku dan literatur sebagai sarana utama dalam pembenahan kurikulum pendidikan.

Kebijakan Pemerintah Jepang terhadap Pendidikan Islam di Indonesia

Pada awal kekuasaan, Jepang memberikan sikap lunak pada pendidikan Islam, seperti pendapat Muh. Amin, (2019:8-9) tanpanya Jepang mendukung sistem pendidikan Islam, hal ini terlihat pada kebijakan :

1. Pondok pesantren yang besar-besar sebagai institusi pendidikan Islam sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pemerintah Jepang.

2. Sekolah negeri dalam berbagai tingkatannya diberi pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran agama.
3. Pemerintah Jepang Memberikan bantuan dana kepada madrasah dan pondok pesantren
4. Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh KH.Wahid Hasyim, Kahar Muzakir dan Bung Hatta (Abbass, 2018).

Jepang melihat besarnya peran Islam di Indonesia, bahkan peranan ulama sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu Jepang mendorong berdirinya Majelis Syura Muslimin Indonesia (MIAI), melalui organisasi ini para ulama melakukan pemajuan pendidikan apalagi dibentuknya *Syumubu* (Jawatan Agama), sehingga terjadi pembaharuan Islam dan elemen-elemennya termasuk pendidikan Islam (Azra, 2005: 207-208). Di depan ulama Pejabat Tertinggi Militer Jepang mengatakan akan melindungi dan menghormati Islam (Benda, 1980: 153).

Perlakuan yang disebutkan di atas, sepertinya Jepang menaruh perhatian besar terhadap pendidikan Islam. Dengan program-program untuk umat Islam dan bantuan dana dari pemerintah Jepang, maka lembaga pendidikan Islam, memiliki kesempatan untuk memasukan unsur-unsur Islam dalam kurikulum dan mata pelajaran. Sekolah dan madrasah dapat melakukan kegiatan belajar dan pembelajaran secara efektif, sehingga kualitas pendidikan dapat meningkat.

Namun setelah pecahnya Perang Dunia II dan kedudukan Jepang terancam oleh Sekutu,

keadaan itu berubah secara drastis.

Jepang memberlakukan sikap tidak berpihak kepada semua organisasi Islam di Indonesia, dengan cara membekukan semua organisasi Islam. Sehingga organisasi Islam yang menyelenggarakan pendidikan, mengalami kesulitan dalam mengembangkan pendidikan Islam, ini berdampak dengan mundurnya kegiatan pembelajaran di pesantren, madrasah, dan pengajian. Pendidikan Islam pun semakin menjadi terbengkalai dan terabaikan. (Zuhri, 2001: 226.)

Akibatnya, pendidikan Islam menjadi terancam, dan penduduk pribumi ditekan dengan cara menjalankan pendudukan militer untuk membantu perang Asia Timur Raya-nya. Jepang memberlakukan kerja paksa (ROMUSHA) juga membentuk pertahanan rakyat semesta, seperti *Haiho*, Peta dan *Keibodan*, sehingga perhatian terhadap dunia pendidikan menjadi menurun (Ishak, 2012: 11).

Penindasan yang begitu massif oleh Jepang, telah mengakibatkan umat Islam memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan pemberontakan melawan Jepang di beberapa daerah. Dunia pendidikan jelas terabaikan, sehingga upaya memajukan pendidikan di Indonesia sulit untuk dilakukan. Namun disisi lain berdiri Sekolah Tinggi Islam di Jakarta memberikan kesempatan yang baik untuk memajukan pendidikan sendiri. Kondisi ini tanpa disadari Jepang dipergunakan oleh umat Islam untuk memperjuangkan pendidikan ataupun perlawanan kepada Jepang.

Berbeda dengan Madrasah dan pesantren yang berada di daerah memiliki kesempatan yang baik, karena terbebas dari pengawasan

langsung dari pemerintah Jepang, sehingga pendidikan dalam pondok pesantren dapat sedikit berjalan memajukan pendidikan di daerah.

Simpulan

Pendudukan Jepang di Indonesia memberikan dampak pada berbagai kehidupan masyarakat, tanpa terkecuali dunia pendidikan mendapat pengaruh pendudukan Jepang. Dalam rangka memenangkan perang Jepang melakukan berbagai kebijakan dalam bidang pendidikan agar dapat mendukung kemenangan Jepang.

Langkah yang dilakukan Jepang dengan cara menyebarluaskan ideologi dan semangat Jepang, mereformasi kurikulum dan membuat kebijakan pada pendidikan Islam. Selama Jepang menjajah Indonesia dalam banyak sisi berdampak buruk bagi pendidikan di Indonesia namun ada beberapa kebijakan yang berdampak positif terhadap pendidikan di Indonesia seperti digunakannya Bahasa Indonesia sebagai Bahasa pengantar, dihapusnya dualisme kurikulum dan pendidikan militer yang berdampak pada kemampuan militer para pemuda Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abbas, A. (2018). Pendidikan di Indonesia pada Masa Jepang. *Dalam Ash-Shahaba: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 4(1), 62-75.
- Adams, C. (2007). *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Jakarta : Yayasan Bung Karno-Media Pressind

- Azra, Azzyumardi. (2005). *Dari Harvard Sampai Makkah*, Jakarta: Nagaritha Dinamika
- Benda, Harry J. (1980). *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Dewi, E. P., Setyanto, A., & Ambarastuti, R. D. (2015). Bentuk propaganda Jepang di bidang sastra pada majalah djawa baroe semasa kependudukan jepang di Indonesia 1942-1945 [Электронный ресурс]. URL: http://fib.ub.ac.id/wrp-con/uploads/Journal-Aurora-April2015_Aji-Setyanto_.pdf (дата обращения: 14.12.2015).
- Effendy, M. (2002). *Perjuangan Mencari Ridha Tuhan*. Yayasan Al-Mukhtar- Universitas Sriwijaya.
- Enung, K. Rukiati dan Hikmawati Fenti. (2006), *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Hardi, tt. *Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Karya
- Hasbullah. (2001). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Imran, Amrin. (2012). Dibawah Pendudukan Jepang 1942-1945. Dalam buku : *Indonesia Dalam Arus Sejarah: Perang Dan Revolusi* jilid 6. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Ishak, M. (2012). Sistem Penjajahan Jepang di Indonesia. *Jurnal Inovasi*, 9(01).
- Posponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (1993). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Balai Pustaka.
- Putri, Arum S. (2020). Akibat Pendudukan Jepang di Bidang Sosial Budaya", dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2020>.
- Saifudin, S., & Saepuddin, D. (2020). Pengaruh kolonialisme Jepang terhadap pendidikan Islam. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 164-177.
- Saminto, S. S. (2020). Peran Pendidikan Di Masa Kependudukan Jepang (1942-1945) Terhadap Perubahan Budaya Di Jawa Barat. *Jurnal ArtefakVol*, 7(2).
- Suwendi. (2004). *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Syamsuddin, Helius. (2007). *Metodelogi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- Yulianti, Dewi. *Sistem Propaganda Jepang Di Jawa 1942-1945*, dalam <http://eprints.undip.ac.id>
- Yusrianto, Y. (2017). Pemikiran politik dan perjuangan KH. M. Hasyim asy'ari melawan kolonialisme. *in right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 3(2).

Zuhri, Syaifuddin. (2001). *Guruku Orang-orang dari Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Sastra LkiS.